

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PRAKTIK MANDIRI BIDAN
DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN SEBAGAI UPAYA
PENURUNAN AKI DAN AKB DI
WILAYAH KABUPATEN BLORA JAWA TENGAH**
TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh :
Ika Herwati
Nim: 22.C2.0083

Kepada
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025

ABSTRAK

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi, termasuk di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berbagai program kesehatan telah diterapkan, dengan data menunjukkan bahwa AKI mencapai 132,10 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB mencapai 13,14 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Kabupaten Blora, Jawa Tengah, merupakan salah satu daerah yang mengalami masalah ini, di mana angka kematian ibu dan bayi masih di atas rata-rata nasional, hal ini menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup pengaturan tanggung jawab hukum praktik mandiri bidan, pelaksanaannya, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk: Mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum, pelaksanaan tanggung jawab hukum, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum praktik mandiri bidan dalam pertolongan persalinan sebagai upaya penurunan AKI dan AKB.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif analitik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kuesioner kepada 12 bidan praktik mandiri di Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan tanggung jawab hukum Praktik Mandiri Bidan dalam pertolongan persalinan di Kabupaten Blora diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021, namun masih memerlukan penguatan untuk kepastian hukum. 2) Pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh bidan sudah cukup baik, tetapi banyak yang belum mendapatkan pelatihan memadai. 3) Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya akses pelatihan, rendahnya pemahaman masyarakat, tidak adanya regulasi khusus, pengaruh sosial dan budaya, serta kurangnya dukungan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan.

Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan pengawasan praktik mandiri bidan, penyederhanaan regulasi, pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem rujukan, penegakan disiplin, dan peningkatan kolaborasi dengan masyarakat. Dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai juga diperlukan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung upaya penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Blora.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Praktik Mandiri Bidan, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi

ABSTRACT

Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in Indonesia remain high, including in Blora Regency, Central Java. Various health programs have been implemented, with data indicating that MMR reached 132,10 per 100,000 live births and IMR reached 13,14 per 1,000 live births in 2023. Blora Regency is one of the regions facing this issue, where maternal and infant mortality rates remain above the national average, making this research crucial. The research problem focuses on the legal responsibility of independent midwifery practice, its implementation, and the obstacles encountered in this practice. The objectives of this study are to examine and analyze the legal framework governing independent midwifery practice, the implementation of legal responsibilities, and the challenges faced in carrying out these responsibilities in providing childbirth assistance as an effort to reduce MMR and IMR.

This study employs a sociological-legal approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews and questionnaires from 12 independent practice midwives in Blora Regency. The findings indicate that: 1) The regulation of legal responsibility for independent practice midwives in childbirth assistance in Blora Regency is governed by Regional Regulation Number 30 of 2021, but it still requires strengthening for legal certainty. 2) The implementation of legal responsibilities by midwives is fairly good, but many have not received adequate training. 3) The obstacles faced include limited access to training, low public understanding, the absence of specific regulations, the influence of social and cultural factors, and insufficient support and supervision from the local government and the Health Office.

Recommendations from this study include enhancing supervision of independent midwifery practices, simplifying regulations, providing ongoing training, strengthening referral systems, enforcing discipline, and improving collaboration with the community. Support from the local government in providing adequate facilities and resources is also necessary. These steps are expected to contribute to efforts to reduce the Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in Blora Regency.

Keywords: *Legal Responsibility, Independent Midwife Practice, Maternal Mortality Rate, Infant Mortality Rate*